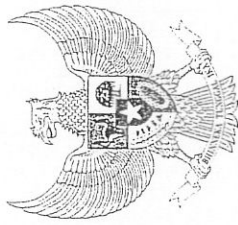




**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2020-2021**

SENIN, 05 OKTOBER 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2020 - 2021

SENIN, 05 OKTOBER 2020

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang Kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;
- Para Anggota DPR;

Hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Masa Persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan berakhir pada hari ini. Selanjutnya DPR akan memasuki Masa Reses, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Masa Persidangan I ini, kita masih bekerja dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19. Kita semua telah bekerja keras, bergotong royong, untuk mengatasi pandemi covid-19 dan menanggulangi dampaknya pada kehidupan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Terdapat lebih dari 200 negara yang juga mengalami permasalahan pandemi covid-19 beserta dampaknya. Belum ada suatu formula yang dapat menangani pandemi covid-19

1

secara efektif. Semua negara berbagi pengalaman terbaik dalam mengatasi pandemi covid-19 dan dampaknya.

Bagi kita, bangsa dan negara Indonesia, semangat kegotongroyongan kita, kerja bersama semua anak bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya, telah membangun ketahanan sosial kita dalam menghadapi bencana non alam pandemi covid-19.

Pemerintah, telah dan terus melakukan berbagai upaya yang terbaik dalam menanggulangi pandemi covid-19 dan dampaknya, dengan memprioritaskan penanganan bidang kesehatan dan tetap memperhatikan perekonomian nasional; Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi.

Kedepan, semua pihak dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya, agar terus meningkatkan upaya-upaya terbaik dalam menanggulangi pandemi covid-19 dan dampaknya.

DPR RI, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, dalam situasi pandemi covid-19, tetap menjalankan tugas konstitusionalnya secara optimal melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

2

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa sidang ini, DPR bersama Pemerintah telah melakukan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah RUU yaitu:

1. Undang Undang tentang Bea Materai, yang merupakan pengganti UU Nomor 13 Tahun 1985 sehingga pajak atas Bea Materai tersebut belum pernah mengalami perubahan sejak 1 Januari 1986 (35 tahun). RUU tentang Bea Materai ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum, dan menyelaraskan dengan perkembangan teknologi serta memberikan perlakuan hukum yang sama, baik dokumen kertas maupun dokumen non kertas (elektronik);
2. Undang Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the the Government of the*

Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence).

3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sehingga dilakukan perbaikan terhadap ketentuan mengenai kedudukan, susunan, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan lain yang berubah dalam RUU ini adalah yang terkait dengan usia minimal, syarat, tata cara seleksi Hakim Konstitusi, dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK;
4. Undang-Undang tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan (*Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement on Services /AFAS*), Pengesahan Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS ini, diharapkan memberikan dampak positif bagi pengembangan industri asuransi umum syariah di Indonesia dan membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan Indonesia untuk mengakses

industri jasa keuangan ASEAN. Pemerintah dalam melaksanakan Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS agar tetap menjaga, melindungi dan memperhatikan kepentingan sistem jasa keuangan nasional;

5. RUU tentang Cipta Kerja. RUU ini telah dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Melalui UU tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia. Apabila Undang Undang ini, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan Undang Undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam fungsi anggaran, DPR dan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, yang dalam pelaksanaannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2019 tersebut dan merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP Tahun 2016.

DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021. APBN Tahun Anggaran 2021 dirancang secara komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi, khususnya reformasi penganggaran, reformasi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi transfer ke daerah dan dana desa. APBN tahun anggaran 2021, memberikan perhatian khusus pada program pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak pandemi covid-19, termasuk juga telah mengantisipasi kebutuhan pengadaan vaksin.

APBN Tahun Anggaran 2021, merencanakan pendapatan negara sebesar Rp. 1.743 Triliun, Belanja Negara sebesar Rp. 2.750 triliun, Defisit sebesar Rp. 1.006 triliun (atau 5,7% terhadap PDB). Dengan Postur APBN yang demikian ini, Pemerintah diamanatkan, oleh UU APBN Tahun Anggaran 2021, agar bekerja secara efisien dan mengoptimalkan efektivitas dampak APBN bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, melalui rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, memberikan perhatian yang besar atas permasalahan-permasalahan yang penting dan strategis, seperti kondisi keamanan nasional, persiapan penyelenggaraan pilkada 2020, penyelenggaraan pendidikan nasional dalam situasi pandemi covid-19, stabilitas sistem keuangan, serta memberikan perhatian khusus pada program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, diharapkan semua Paslon, mengedepankan komunikasi mengenai visi misi membangun daerah, serta ikut membangun kesadaran dan kedisiplinan protokol covid di wilayahnya, disiplin dalam melaksanakan kampanye, dengan

mengutamakan keselamatan rakyat dari ancaman pandemi covid-19.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa sidang ini, kita masih berusaha tetap optimal dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, termasuk aktif mengikuti berbagai pertemuan internasional yang diadakan secara virtual. Beberapa pertemuan tersebut antara lain: ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly*, di mana Indonesia kembali mengajak parlemen di kawasan untuk memberi sikap atas situasi di Rohingya.

Kerja sama internasional untuk menangani Covid-19 dari berbagai aspek juga masih menjadi tema utama pertemuan internasional. Beberapa pertemuan penting di mana Indonesia mengambil peran aktif antara lain: OECD, WTO, *Asia Pacific Parliament for Global Health*, dan Pertemuan Tingkat Tinggi PBB untuk SDGs, termasuk pertemuan penting ketua-ketua parlemen sedunia yang diadakan setiap 5 tahun sekali. GKSB yang telah diresmikan pada bulan Februari 2020 juga telah aktif melakukan pertemuan, antara lain GKSB Turki, Finlandia, Amerika Serikat, Perù, Azerbaijan, dan Uni Eropa.

Pada Masa Sidang I ini, DPR telah memberikan pertimbangan terhadap 7 (*tujuh*) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 masih akan berlanjut. Kita semakin dituntut untuk memperkuat kerja bersama, gotong royong, dalam membangun kekuatan bersama rakyat agar rakyat memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, rakyat memiliki ketahanan sosial, rakyat juga memiliki ketahanan ekonomi, serta rakyat memiliki optimisme untuk menghadapi situasi yang sulit ini.

Saat ini jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat di sejumlah daerah. Rakyat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini.

Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi, bersinergi, dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Ambil kebijakan yang berbasis data, dengarkan masukan dari berbagai pihak, hadirkan politik dengan wajah kemanusiaan, jangan politisasi keadaan.

Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang sudah berdamai diri dirumah selama ini untuk menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Kita harus terus berdisiplin, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak fisik. Menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19 adalah bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Kita butuh gotong royong berskala besar dalam melawan pandemi Covid-19. Insya Allah dengan kita kerja bersama maka Indonesia akan bisa melewati tantangan ini.

Tibalah saatnya, Anggota DPR RI untuk melaksanakan reses, yaitu masa dimana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja di daerah pemilihannya. Reses saat ini masih akan dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19.

Kepada Yth Anggota DPR RI, agar bersama rakyat di daerah pemilihannya, bekerja bersama, bergotong royong, dalam memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan covid-19; marilah kita bangun bersama rakyat kesadaran, kemauan dan kedisiplinan bersama, untuk menjalankan hal-hal sederhana tetapi berdampak sangat besar yaitu protokol Covid-19. Pergunakanlah juga, kesempatan Masa Reses ini, untuk

menyampaikan kepada rakyat, tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baik itu melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Atas nama Pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Kami ucapkan selamat bekerja, selamat bertemu dengan rakyat, selalu jaga kesehatan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI